



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 124 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia perlu dilakukan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas atas kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
  - b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

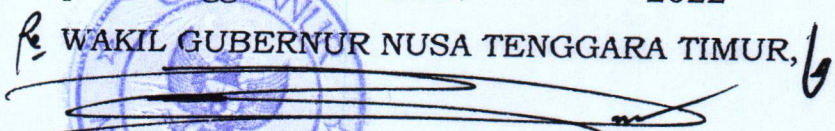
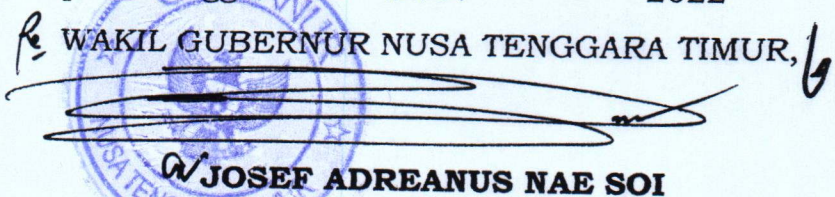
**KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada perangkat daerah dan masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelakunya;
- e. menyusun petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mengacu pada pedoman teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental kementerian Dalam Negeri;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada Gugus Tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
- h. menyiapkan mekanisme dalam menangani pengaduan.

- KETIGA** : Susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 124 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	K e t u a	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. memberikan gambaran terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Wakil Ketua III	
5.	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Wakil Ketua IV	
6.	DANLANUD El Tari Kupang	Wakil Ketua V	
7.	DANLANTAMAL Kupang	Wakil Ketua VI	
8.	Ketua Kominda Provinsi NTT	Wakil Ketua VII	
9.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Pelaksana Harian	a. mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengoordinasikan hasil penyusunan laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. bertanggung jawab secara administrasi.
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	
12.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	

1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>BIDANG GERAKAN NTT MANDIRI</b>		
1.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);
4.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif);
6.	Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT		f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
9.	Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		i. penurunan Indeks persepsi korupsi;
10.	Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT		j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
11.	Direktur INTELKAM Polda NTT		k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
12.	Kabag. Reskrim Umum Polda NTT		
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT		
14.	Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan NTT		
15.	Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) NTT		
16.	Ketua Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT		

1	2	3	4	
<b>II.</b>	<b>BIDANG GERAKAN NTT BERSATU</b>			
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;	
2.	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	b. peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		c. peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme dan kesetiakawanan sosial;	
4.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi NTT		d. peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		e. peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marginal;	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		f. peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat di dalam pembangunan;	
7.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		g. peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor; dan	
8.	Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		h. peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;	
9.	Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		i. penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti ; dan	
10.	Kakanwil. Kementerian Agama Provinsi NTT		j. peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun.	
11.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT			
12.	Direktur BNN POLDA NTT			
13.	WADANLANUD El Tari Kupang			
14.	WADANLANTAMAL Kupang			
15.	Ketua KOMINDA Provinsi NTT			
16.	WAKABIN Daerah Provinsi NTT			
17.	Ketua FKUB Provinsi NTT			

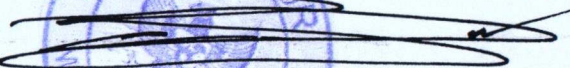
18	Ketua FPK Provinsi NTT		
19	Ketua FKDM Provinsi NTT		
20	Ketua FKPT Provinsi NTT		
21	Kepala BNNP Daerah Provinsi NTT		
22	Kepala BAIS Daerah Provinsi NTT		
23	Ketua Laskar Merah Putih NTT		
<b>III. BIDANG GERAKAN NTT MELAYANI</b>			
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;</p> <p>c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);</p> <p>d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system);</p> <p>e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif);</p> <p>f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);</p> <p>g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);</p> <p>h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;</p>
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
8.	Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
11.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

1	2	3	4
13.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
14.	Inspektur Provinsi NTT		
15.	Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT		
16.	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang		
17.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang		
18.	Direktur PT. Semen Kupang		
19.	Pimpinan Redaksi Pos Kupang		
20.	Pimpinan Trans Nusa Kupang		
21.	Ketua Wanita Katolik RI (WKRI) DPS NTT		
22.	Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) NTT		
23.	Ketua Yayasan Nusa Bunga NTT		
24.	Ketua Rumah Perempuan		
<b>IV. BIDANG GERAKAN NTT TERTIB</b>			
1.	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif ( <i>e-government</i> ); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja ( <i>performance-based management system</i> ); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
6.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Umum Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

1	2	3	4
9.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Anggota	g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan; dan l. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
10.	Direktur LANTAS POLDA NTT		
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
12.	Pimpinan Ombudsman Provinsi NTT		
13.	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) NTT		
14.	Ketua DPW Tipikor NTT		
<b>V. BIDANG GERAKAN NTT BERSIH</b>			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system); e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif); f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT		
8.	Kepala Biro Hukum Provinsi NTT		

1	2	3	4
9.	Kakanwil. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	g. penyerderhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. penurunan Indeks persepsi korupsi; j. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan k. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
10.	Direktur BLUD-SPAM Provinsi NTT		
11.	Ketua Ultrans Victory NTT		
12.	Ketua Arbetter Samariter Bund (ASB) Nusa Tenggara Timur		
13.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**



**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 124 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Melayani	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Melayani.
4.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Mandiri	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Mandiri.
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Tertib.	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Tertib.
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersih	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersih.
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab Gugus Tugas Gerakan NTT Bersatu	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan Gerakan NTT Bersatu.
8.	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
9.	Drs. Kamang Kopong/Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Antonia Wollo, S.Sos./Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi NTT.
11.	Achmad Nur Zailani, S.Tr.IP./Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Oktovianus Maupelun/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI